KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Mayoritas Fraksi DPR Dukung Budi
Tanggal : Selasa, 13 Januari 2015
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 1

Mayoritas Fraksi DPR Dukung Budi

Presiden Jokowi menjunjung asas praduga tak bersalah. Rapat Bamus DPR hari ini akan menentukan apakah KPK dan PPATK dilibatkan atau tidak.

NUR AIVANNI

REKOMENDASI Presiden Joko Widodo ke DPR soal pengajuan nama Komisaris Jenderal Budi Gunawan untuk menjadi Kepala Kepolisian RI diperkirakan tidak akan bertepuk sebelah tangan.

Sebagian besar fraksi di Senayan mengamini rekomendasi agar jenderal bintang tiga yang kini menjabat Kepala Lembaga Pendidikan Polri (Kalemdikpol) itu memimpin Polri menggantikan Jenderal Sutarman.

"Kemungkinan untuk ditolak itu kecil sekali. Saya mendengar, membaca, bahkan Golkar, PDIP, fraksi terbesar, sudah menerima. Termasuk PPP tentunya," kata anggota Komisi III dari F-PPP Hasrul Azwar di Senayan, Jakarta, kemarin. Menurut dia, Budi layak memimpin Korps Bhayangkara.

Senada, Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengatakan penunjukan Budi oleh Jokowi sudah lolos kualifikasi. Hal itu, katanya, melalui pengkajian yang mendalam. "Presiden pasti mengkaji sangat serius kapasitas sosok personel. PAN menghargai aspirasi hak prerogatif Presiden itu."

Presiden Jokowi pada Jumat (9/1) mengirimkan surat bernomor R-01/Pres/01/2015 kepada Ketua DPR Setya Novanto perihal pemberhentian dan pengangkatan Kapolri.

Dukungan juga mengalir dari Golkar. Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPR Bambang Soesatyo mendukung pencalonan alumnus Akademi Kepolisian 1983 itu sebagai Kapolri. "Paling tidak dia pernah memimpin wilayah menjadi kapolda dua kali," jelas anggota Komisi III DPR RI itu.

Politikus Gerindra Desmond Junaedi Mahesa menilai penunjukan Budi memenuhi dua syarat. "Dia ditunjuk oleh Presiden selaku pemilik hak prerogatif, dan kedua mendapat rekomendasi Kompolnas," tutur Wakil Ketua Komisi III DPR itu.

Setali tiga uang, anggota Komisi III dari Fraksi NasDem Patrice Rio Capella memandang tepat penunjukan Budi. "Dari pendidikan punya *background* yang baik."

Di sisi lain, seiring pengajuan nama Budi Gunawan, isu rekening gendut riuh kembali. Namun, politikus Demokrat Benny K Harman mengatakan soal itu sudah diklarifikasi empat tahun silam.

Tunggu Bamus DPR

Terkait dengan perlu tidaknya KPK serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyelisik rekening bekas ajudan Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri itu, Ketua Komisi III Aziz Syamsuddin mengatakan soal itu menunggu rapat Bamus DPR hari ini. "Tim kecil akan menentukan pihak-pihak mana yang akan didengar," jelasnya.

Namun, politikus PDI Perjuangan Pramono Anung angkat bicara bahwa tidak perlu melibatkan kedua lembaga itu.

"Tidak ada UU yang mengharuskan," tegasnya.

Anggota DPD Gede Pasek Suardika mengatakan tidak etis KPK terlibat dalam pencalonan Kapolri. "Ini menjaga psikologis kedua lembaga penegak hukum itu. Hal yang sama dilakukan saat memilih Jaksa Agung HM Prasetyo," katanya.

Menurut rencana, tim kecil akan mengunjungi kediaman Budi Gunawan pada Kamis (15/1). Selanjutnya, Komisi III akan menggelar uji kelayakan dan kepatutan pada Senin (19/1).

Secara terpisah, Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai Presiden Jokowi menerapkan asas praduga tak bersalah dalam memilih Budi Gunawan.

"Kalau di belakang ada tuntutan, ya masalah hukum itu nanti. Pemerintah tidak bisa mengambil keputusan karena isu," tandasnya.

Tak ingin berpolemik soal Budi Gunawan, Presiden menyerahkan sepenuhnya ke DPR. "Itu kan dari Kompolnas berikan usulan ke saya. Silakan kita tunggu proses di DPR," katanya di Bandung, kemarin.

Komisioner Komponlas Edi Saputra Hasibuan mengakui Budi berhasil mengeliminasi delapan calon lain yang diajukan ke Presiden.

Jika lolos uji di DPR dan resmi menjadi Kapolri, lanjut Edi, Budi harus melakukan revolusi mental di tubuh Polri. "Seperti kata Presiden Jokowi, bisa kerja siang malam melayani masyarakat," imbuhnya. (Tim/X-6)

aivanni
@mediaindonesia.com

"Kalau di belakang ada tuntutan, ya masalah hukum itu nanti. Pemerintah tidak bisa mengambil keputusan karena isu."
Jusuf Kalla
Wakil Presiden RI

MI/PANCA SYURKANI

Kirimkan tanggapan Anda atas berita ini melalui e-mail: interupsi@mediaindonesia.com Facebook: Harian Umum Media Indonesia Twitter: @Mldotcom Tanggapan Anda bisa diakses di metrotvnews.com